



SKRIPSI

**PENGELOLAAN DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN
MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR
12 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

*MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY OF THE LOCAL
FINANCIAL SYSTEM IN MANGGARAI REGENCY EAST NUSA
TENGGARA ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION
MANGGARAI DISTRICT NUMBER 12 OF 2010 ABOUT ON THE
PRINCIPLES OF FINANCIAL MANAGEMENT*

Oleh:

PRISKA CELINA BETANIA
NIM: 090710101254

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN
MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR
12 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

***MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY OF THE LOCAL
FINANCIAL SYSTEM IN MANGGARAI REGENCY EAST NUSA
TENGGARA ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION
MANGGARAI DISTRICT NUMBER 12 OF 2010 ABOUT ON THE
PRINCIPLES OF FINANCIAL MANAGEMENT***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana Hukum

Oleh:

Priska Celina Betania

090710101254

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Orang yang berpikir pekerjaannya penting mendapat isyarat mental tentang bagaimana melakukan pekerjaannya dengan lebih baik, dan pekerjaan yang lebih baik berarti promosi lebih besar, uang lebih banyak, prestise lebih besar, dan kebahagiaan lebih besar”.

(David J.Schwartz)¹

¹ David J.Schwartz. Berpikir Dan Berjiwa Besar. Jakarta: Binarupa Aksara. 2007. Hal 184.

PERNYATAAN

Saya yang betandatangan di bawah ini :

Nama : Priska Celina Betania

NIM : 090710101254

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “Pengelolaan dan Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (*Management and Accountability Of The Local Financial System In Manggarai Regency East Nusa Tenggara According To Government Regulation Manggarai District Number 12 Of 2010 About On The Principles Of Financial Management*)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2013

Yang menyatakan,

Priska Celina Betania

090710101254

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda tercinta, Stanislaus Bambar dan Ibunda tersayang, Fransiska Afrida , yang tidak pernah lelah berlutut untuk berdoa, menjadi teladan bagi keluarga, memberikan kasih sayang, nasihat dan motivasi yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati yang tiada lelah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PENGELOLAAN DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN
MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR
12 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH**

***MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY OF THE LOCAL
FINANCIAL SYSTEM IN MANGGARAI REGENCY EAST NUSA
TENGGARA ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION
MANGGARAI DISTRICT NUMBER 12 OF 2010 ABOUT ON THE
PRINCIPLES OF FINANCIAL MANAGEMENT***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum (S1) dan mencapai gelar sarjana Hukum

Oleh:

Priska Celina Betania

NIM: 090710101254

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PENGELOLAAN DAN SISTEM
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN KEUANGAN DAERAH
DI KABUPATEN MANGGARAI NUSA TENGGARA TIMUR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

***MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY OF THE LOCAL FINANCIAL
SYSTEM IN MANGGARAI REGENCY EAST NUSA TENGGARA
ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION MANGGARAI
DISTRICT NUMBER 12 OF 2010 ABOUT ON THE PRINCIPLES OF
FINANCIAL MANAGEMENT***

Oleh:

Priska Celina Betania

NIM: 090710101254

TELAH DISETUJUI

TANGGAL 20 JUNI 2013

Oleh

Pembimbing

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP.195911151985122001

Pembantu Pembimbing

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP.196011221989021001

PENGESAHAN

Skripsi, berjudul : “Pengelolaan dan Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (*Management and Accountability Of The Local Financial System In Manggarai Regency East Nusa Tenggara According To Government Regulation Manggarai District Number 12 Of 2010 About On The Principles Of Financial Management*)”.

Oleh

Priska Celina Betania

090710101254

Pembimbing,

R.A Rini Anggraini, S.H., M.H

NIP. 195911151985122001

Pembantu Pembimbing,

Ida Bagus Oka Ana, S.H., MM.

NIP.196011221989021001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan tim penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh tim penguji fakultas hukum universitas jember.

Tim penguji,

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Antikowati, S.H., M.H.

NIP: 196112021988022001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP: 197805312005012001

Anggota Penguji,

Tanda Tangan,

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.

NIP: 195911151985122001

Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.

NIP: 196011221989021001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, kasih karunia, anugerah dan Roh Hikmat Pengertian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :“*Pengelolaan dan Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Management and Accountability Of The Local Financial System In Manggarai Regency East Nusa Tenggara According To Government Regulation Manggarai District Number 12 Of 2010 About On The Principles Of Financial Management)*”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, masukan, dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana , S.H., M.M., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Ketua Dosen Penguji, Ibu Antikowati, S.H.,M.H., yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini;
4. Sekretaris Dosen Penguji, Ibu Rosita Indrayati yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam ujian skripsi ini
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.;

6. Bapak Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Gautama Budi Arundati, S.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Antikowati, S.H., M.H. dan Ibu Asmara Budi Dyah Darma Sutji, S.H., selaku Komisi Pembimbing Bagian hukum Tata Negara Fakultas hukum Universitas Jember;
10. Ibu Dwi Endah Nurhayati S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Staf Akademik, Staf kemahasiswaan dan Staf Administrasi di fakultas hukum universitas Jember atas pelayanan selama penulis menjadi mahasiswa;
13. Guru-guruku mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
14. Ayahanda tercinta, Stanis Bambar dan Ibunda terkasih, Fransiska Afrida , yang tidak pernah lelah berlutut untuk berdoa, menjadi teladan bagi keluarga, memberikan kasih sayang dan motivasi yang begitu luar biasa;
15. Kakakku tercinta dr.Maria Helena Wene, Susana Carolina Eden S.E., A.K., adik-adik tersayang Hendrianus Babbista dan Reinardus Bambar yang mendoakan, mendorong dan memberikan kasih sayang yang begitu banyak kepada penulis;
16. Sepupuku Dionisius Epaafroditus, Mardi Dhika dan semuanya yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis;

17. Seluruh Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa;
18. Koko Wildan Gunawan Wijaya dan keluarga yang selalu memberikan dukungan,nasihat, kasih dan doa;
19. Ibu-ibuku di Jember (Mami Prita dan Mami Sianne) dan keluarga besar lingkungan Bernadeth terima kasih buat nasehatnya.;
20. Teman seperjuangan serta sahabat-sahabatku, Ayu Aroma Budiati S.H., Ummu Kulsum, Sasmita Yulindha, Herni Chandra sari, Ana Atika, Vira Arista Indika Yanti, Gianluca S.V, Iqbal khofī ,Teguh Prakoso makasih atas kebersamaan dalam suka maupun dukanya ;
21. Teman2 di UKMKK dan Futsal St.Yusup (Lilin, Hans, Toni, Kadek, Flos, Alfa, Alus, Obi, Hesti, dll) *keep on fire, and be the servant of Jesus,* kenangan bersama kalian takkan pernah terlupakan;
22. Semua temen2 Hukum '09, Sukses semua ya.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, 28 Juni 2013

Penulis

Priska Celina Betania

RINGKASAN

Penulisan Skripsi yang berjudul : “Pengelolaan dan Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (*Management and Accountability Of The Local Financial System In Manggarai Regency East Nusa Tenggara According To Government Regulation Manggarai District Number 12 Of 2010 About On The Principles Of Financial Management*)”. Ini ditulis dengan latar belakang pentingnya keuangan daerah dalam suatu pengelolaan dan sistem pertanggungjawaban keuangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah pertama Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kedua Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur, dan ketiga Kendala apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai penulis. Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai pengelolaan dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur.

Tipe penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Diharapkan dari metode penelitian yuridis normatif ini, dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif, sehingga menghasilkan suatu skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum dengan menjawab permasalahan yang diajukan, sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Pengelolaan dan Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Mekanisme penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur diatur dalam Peraturan daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, namun dalam hal ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa tahap yaitu: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan APBD, dan pertanggungjawaban APBD. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah kepala daerah adalah pemegang kekuasaan dan penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah namun dalam hal ini kepala daerah dapat dibantu oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah yaitu Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; Kepala SKPKD atau selaku PPKD; Kepala SKPD selaku pejabat pengguna

anggaran/pengguna barang. dan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sistem pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah dilakukan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dimana kepala daerah selaku pemegang kekuasaan dan penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kendala yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah pertama belum adanya sistem akuntansi pemerintah ,yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal. Yang kedua Tidak adanya sistem akuntansi yang handal sehingga mengakibatkan lemahnya pengendalian intern (*internal Control*) pemerintah daerah. Yang ketiga adalah sangat terbatasnya jumlah personel pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka tidak begitu peduli atau tidak begitu mengerti dengan permasalahan yang terjadi. belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku. Standar akuntansi tersebut sangat penting sebagai pedoman untuk pembuatan laporan keuangan dan sebagai salah satu mekanisme pengendalian. Penggunaan anggaran yang berbasis kinerja kerja membawa implikasi pada pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi dalam pengeluaran daerah.

Saran yang diberikan penulis adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai dalam merekrut personel pemerintah daerah harus melihat sumber daya manusia sesuai proposional dengan bidangnya, serta secara rutin melakukan pembinaan kepada para aparatur atau pejabat yang melaksanakan pengelolaan terhadap keuangan daerah. Pemerintah Pusat lebih meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pembinaan kepada pengawas pengelolaan keuangan daerah.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.3.3 Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
a. Bahan Hukum Primer	9
b. Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan	12

2.1.1 Pengertian Pemerintahan	12
2.1.2 Pembagian Urusan Pemerintahan	13
2.2 Pemerintahan Daerah	15
2.2.1 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan	15
2.2.2 Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17
2.2.3 Pengertian Pemerintahan Daerah	20
2.2.4 Dinas-Dinas Daerah	22
2.3 Keuangan Daerah	22
2.3.1 Pengertian Keuangan Daerah	22
2.3.2 Pendapatan Asli Daerah	23
2.3.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	25
2.3.4 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai	26
2.4 Pengawasan Keuangan Daerah	27
2.4.1 Pengertian Pengawasan	27
2.4.2 Ruang Lingkup Pengawasan	28
2.4.3 Mekanisme Pengawasan	29
2.4.4 Badan Pengawas Daerah (Inspektorat)	30
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	32
3.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur	32
3.1.2 Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur	40
3.2 Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur	47
3.3 Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur	51